



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 78 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA**  
**PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN**  
**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka;
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 50A Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2017 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bangka berupa Tanah dan/atau Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
6. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang betwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang mempunyai fungsi pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
11. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
12. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
18. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
20. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

24. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan Dan Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman dalam pemberian Insentif kepada Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD dalam pelaksanaan pemanfaatannya berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

##### Pasal 3

Peraturan Bupati ini memiliki ruang lingkup :

- a. penerima insentif;
- b. besaran insentif; dan
- c. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

#### BAB II

#### PENERIMA INSENTIF

##### Pasal 4

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pemanfaatan BMD dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan untuk :
  - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
  - b. mengoptimalkan Pemanfaatan BMD; dan
  - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dalam bentuk :
  - a. Sewa;
  - b. Bangun Guna Serah;
  - c. Bangun Serah Guna;
  - d. Kerjasama Pemanfaatan;
  - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

##### Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk pemanfaatan BMD pada :
  - a. Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian Insentif pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan kepada :

- a. Bupati selaku pemegang kekuasaan BMD;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
  - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
  - d. Pengurus Barang Pengelola;
  - e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan
  - f. Pejabat atau pegawai pada pemerintah daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (3) Pemberian Insentif pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada :
- a. Bupati selaku pemegang kekuasaan BMD;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD;
  - c. Pengguna Barang;
  - d. Kuasa Pengguna Barang; dan/atau
  - e. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
  - f. Pengurus Barang Pengguna; dan/atau
  - g. Pengurus Barang Pembantu; dan
  - h. Pejabat atau pegawai pada pemerintah daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

### BAB III

#### BESARAN INSENTIF

##### Pasal 6

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan besaran yang ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

##### Pasal 7

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan istri/suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
  - d. tunjangan beras.
- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus menyetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

## Pasal 8

Penerima dan besaran pembayaran atas pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah selaku instansi yang melaksanakan atau mengelola pemanfaatan BMD pada pengelola barang dan pengguna barang menyusun penganggaran penerimaan daerah hasil pemanfaatan BMD dan belanja insentif pengelola pemanfaatan BMD.
- (2) Penganggaran penerimaan daerah hasil pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah/PAD jenis Lain-lain PAD yang Sah pada:
  - a. rincian obyek Hasil Sewa BMD yang diuraikan pada sub rincian obyek Hasil Sewa BMD;
  - b. rincian obyek Kerja Sama Pemanfaatan BMD yang diuraikan pada sub rincian obyek Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD;
  - c. rincian obyek Hasil dari Bangun Guna Serah yang diuraikan pada sub rincian obyek Hasil dari Bangun Guna Serah;
  - d. rincian obyek Hasil dari Bangun Serah Guna yang diuraikan pada sub rincian obyek Hasil dari Bangun Serah Guna;
  - e. rincian obyek Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang diuraikan pada sub rincian obyek Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Penganggaran belanja insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi jenis Belanja Pegawai obyek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN rincian obyek Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang diuraikan pada sub rincian obyek Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan Pendapatan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pembayaran

### Pasal 10

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah, pembayaran insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.

(3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 11

Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 26 Desember 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007